

TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KUALITAS PENGUNGKAPAN CSR

Princilvanno A. Naukoko¹, Sutrisno T², Nurkholis³, Erwin Saraswati⁴

¹Akuntansi, FEB Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

^{2,3,4}Akuntansi, FEB Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

e-mail: v4naukoko@unsrat.ac.id¹ sutrisnoub03@gmail.com² nurkholis@ub.ac.id³ erwin_saraswati@yahoo.com⁴

diterima: 22-07-2023 disetujui: 16-09-2023

Abstrak

Adanya kewajiban perusahaan untuk melakukan kewajiban sosial dan lingkungan, pihak manajemen perusahaan cenderung menggunakan pengungkapan CSR sebagai salah satu strategi untuk legitimasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan CSR. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan menggunakan model analisis regresi panel. Penelitian ini menganalisis 29 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dengan total 174 observasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa tata kelola perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan CSR perusahaan. Penting bagi perusahaan untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan tata kelola yang transparan kepada para *stakeholder* agar dapat mengidentifikasi resiko dan merumuskan strategi dalam menanggulangi resiko sosial dan lingkungannya. Pada akhirnya CSR perusahaan yang sesuai akan memperoleh legitimasi dari para pemangku kepentingan karena telah memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan.

Kata kunci: Tata Kelola Perusahaan, Kualitas Pengungkapan CSR, Legitimasi.

Abstract

Due to the company's obligation to carry out social and environmental obligations, the company's management tends to use CSR disclosure as one of the strategies to legitimize the company. This study aims to determine the effect of corporate governance on the quality of CSR disclosure. The approach used in this study is a quantitative approach using a panel regression analysis model. This study analyzed 29 mining companies listed on the IDX with a total of 174 observations. The results prove that corporate governance can improve the quality of CSR disclosure of mining companies. It is important for companies to maintain and develop transparent governance management to stakeholders in order to identify risks and formulate strategies in tackling social and environmental risks. In the end, appropriate corporate CSR will gain legitimacy from stakeholders because it has met stakeholder expectations.

Keywords: Corporate Governance, Quality of CSR Disclosure, Legitimacy.

Pendahuluan

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki banyak perusahaan pertambangan yang mengeksploitasi hasil bumi. Kontribusi dari sektor pertambangan akan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 12% pada akhir tahun 2024 (PGR, 2023). Agar kontribusi dari perusahaan pertambangan dapat berkelanjutan, maka aspek tanggung jawab perusahaan atas sosial lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi penting untuk diperhatikan. Pelaksanaan CSR tidak lepas dari pengaruh peran pemerintah. Sebagai pembuat regulasi, pemerintah memainkan peran penting dalam menjaga situasi konflik dan kesetaraan sosial. Hal ini sesuai dengan Teori Ekonomi Politik (PET) yang mempelajari tentang interaksi dari kekuasaan politik dan perekonomian dalam suatu masyarakat. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi aspek kegiatan manusia seperti pekerjaan, keluarga, pendidikan dan tarif pajak, bahkan untuk mengatur informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan lewat penetapan regulasi yang berlaku (Tinker, 1984).

Sejak tahun 2007, pemerintah Indonesia mendorong Perseroan Terbatas untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial ditetapkan sebagai kewajiban perusahaan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tuntutan ini semakin diperkuat lagi setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseoran Terbatas. Dorongan pemerintah kepada perusahaan tidak berhenti pada melakukan CSR tetapi berlanjut pada pelaporan atau pengungkapan kegiatan CSR. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 / POJK.03 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, menetapkan bahwa perusahaan publik yang diwajibkan untuk melakukan CSR agar melaporkannya dalam bentuk laporan keberlanjutan.

Fakta yang sangat disayangkan bahwa dari sekian banyak perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia, tidak ada perusahaan pertambangan yang masuk sebagai penerima penghargaan pada Indonesian CSR Award-V-2022 (Corry, 2022). Hal ini memberikan indikasi akan masih rendahnya CSR yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Perusahaan pertambangan dinilai masih belum bisa mengidentifikasi dan menanggulangi resiko dengan baik atas masalah sosial dan lingkungan yang merupakan dampak dari kegiatan perusahaan pertambangan. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah masih belum mampu untuk mendorong perusahaan untuk memberikan pertanggungjawaban sosial lingkungan yang lebih baik.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa, pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia lebih sekedar untuk memenuhi tuntutan regulasi dan mendapatkan legitimasi dari pemerintah dan masyarakat. Pengungkapan CSR cenderung digunakan oleh manajemen perusahaan untuk membangun persepsi dan kesan yang positif (Gunawan, 2015), meningkatkan citra dan juga mendapatkan legitimasi dari para pemangku kepentingan karena telah peduli terhadap sosial lingkungan (Anugerah *et al.*, 2018). Sementara itu, ekspektasi dari masyarakat Indonesia pada umumnya yang cenderung mengharapkan perusahaan untuk lebih mengutamakan tanggung jawab perusahaan dengan memberikan bantuan sumbangan dan sejenisnya (*philanthropic responsibility*) dibandingkan dengan pertanggung jawaban secara ekonomi dan sosial lingkungan (Arli & Tjiptono, 2014). Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa, secara global pelaporan CSR perusahaan pada praktiknya memang cenderung digunakan perusahaan sebagai pendekatan simbolis untuk memenuhi legitimasi (Michelon *et al.*, 2015). Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme tata kelola yang baik untuk meningkatkan pengungkapan CSR.

Mekanisme tata kelola yang memiliki dewan direksi independen di dalam perusahaan dapat meningkatkan pengungkapan informasi, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan (Khan *et al.*, 2013; Suyono & Farooque, 2018). Latar belakang yang dimiliki oleh para anggota dewan komisaris dan direksi perusahaan dapat mempengaruhi

pengungkapan informasi tentang CSR perusahaan (Fernández *et al.*, 2018). Selain itu karakteristik kepemilikan keluarga yang terdapat di mekanisme tata kelola perusahaan memiliki pengaruh atas pengungkapan CSR (Syed & Butt, 2017). Hasil yang berbeda mengenai tata kelola perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan CSR (Cabeza *et al.*, 2017; Giannarakis *et al.*, 2014). Bertolak dari *research gap* yang ada dari pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh mekanisme tata kelola terhadap kualitas pengungkapan CSR di perusahaan Indonesia.

Teori *stakeholder* menjelaskan keterkaitan manajemen tata kelola dengan pengungkapan CSR dari perspektif tanggung jawab organisasi yang luas dan hak pemangku kepentingan. Pengungkapan CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial. Perspektif teori legitimasi, memandang pengungkapan CSR merupakan langkah strategis bagi manajemen perusahaan untuk memperoleh legitimasi dari para pemangku kepentingan (Fernando & Lawrence, 2014). Penggunaan kedua teori tersebut tidak dapat dipisahkan mengingat teori *stakeholder* dan teori *legitimacy* bersifat saling melengkapi dalam menjelaskan praktik pengungkapan CSR (Gray *et al.*, 1995). Pengungkapan CSR merupakan salah satu komponen pertanggung jawaban dari mekanisme tata kelola perusahaan terhadap para *stakeholder*. Berdasarkan pada kedua sudut pandang teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika manajemen melakukan pertanggungjawabannya atas lingkungan sosial lewat pengungkapan CSR sesuai dengan kesepakatan bersama para pemangku kepentingannya, secara tidak langsung juga mendapatkan legitimasi dari para pemangku kepentingannya.

Pengungkapan CSR perusahaan merupakan cara bagi pemimpin perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari pemangku kepentingan (*stakeholder*). Perusahaan dapat menggunakan sejumlah inisiatif pengungkapan CSR untuk melayani kepentingan *stakeholder* mereka (Prior *et al.*, 2008). Ketika perusahaan mengalokasikan sumber daya untuk melaksanakan inisiatif CSR sesuai dengan preferensi *stakeholder*, inisiatif tersebut akan berdampak positif dan meningkatkan kinerja CSR di mata para *stakeholder* (Michelon *et al.*, 2013). Pertanggungjawaban perusahaan akan lingkungan dan sosial yang memberikan persepsi dan kesan yang positif akan menarik perhatian para investor untuk menginvestasikan modal mereka atas perusahaan tersebut (Kamodi *et al.*, 2022; Runtu & Naukoko, 2014). Hal ini akan berujung pada tersedianya modal tambahan bagi perusahaan untuk melaksanakan aktivitas operasionalnya. Berdasarkan pada penelitian terdahulu dan teori *stakeholder* dan *legitimacy*, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan CSR perusahaan.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan model penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Perusahaan publik yang tercatat di sektor pertambangan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2021 digunakan sebagai populasi penelitian. Alasan dari memilih perusahaan pada sektor pertambangan adalah dampak yang diberikan oleh aktivitas perusahaan pada sektor ini yang sangat berpotensi untuk menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial, serta fakta yang menunjukkan bahwa tidak adanya perusahaan pertambangan yang terpilih untuk mendapatkan penghargaan pada Indonesian CSR Award-V-2022 menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan belum bisa mengungkapkan informasi mengenai resiko dan penanggulangan resiko masalah sosial dan lingkungan dalam laporan keberlanjutan dengan baik. Tahun 2016 digunakan sebagai awal periode pengamatan karena pada tahun tersebut, mulai diberlakukannya *global reporting initiative standards* sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan CSR.

Data penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang disajikan bersama-sama dengan laporan tahunan ataupun secara terpisah. Data laporan tahunan dan laporan keberlanjutan diambil dari website masing-masing perusahaan yang menjadi sampel dari penelitian ini. Purposive sampling digunakan untuk memilih sampel dari populasi yang ditentukan dengan menggunakan beberapa kriteria tertentu (Sekaran & Bougie, 2017). Perusahaan yang melakukan IPO sesudah tahun 2016 dikeluarkan dari sampel penelitian agar supaya peneliti memiliki data panel yang lengkap pada periode pengamatan tahun 2016-2021. Perusahaan yang mengalami defisiensi modal akan dikeluarkan dari sampel penelitian. Hal ini dilakukan untuk mencegah biasanya data dari adanya kondisi modal perusahaan yang mengalami minus. Perusahaan yang mengalami defisiensi modal kemungkinan tidak dapat melakukan kegiatan CSR yang optimal karena memiliki masalah keterbatasan sumber daya modal yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa publikasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan, oleh karena itu peneliti mengeluarkan perusahaan yang laporan tahunan dan laporan keberlanjutannya tidak dapat diakses oleh peneliti. Berdasarkan pada kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam pemilihan sampel, peneliti memperoleh 29 perusahaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk dijadikan sampel. Periode pengamatan penelitian ini adalah tahun 2016-2021, dengan 29 perusahaan yang dijadikan sampel, maka jumlah observasi penelitian ini adalah sebanyak 174.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas pengungkapan CSR. Berdasarkan pada keterbatasan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengukuran CSR berdasarkan indeks pengungkapan dinilai masih belum mampu untuk menjelaskan praktik tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan (Khan *et al.*, 2013). Peneliti menggunakan pengukuran pengungkapan praktik CSR yang bisa melihat kualitas dari informasi pengungkapan CSR dalam penelitian ini menggunakan model pengukuran yang digunakan oleh Raar (2002).

Tabel 1. Definisi Skor Kualitas Pengungkapan CSR

Kualitas Pengungkapan CSR	Definisi Kualitas Pengungkapan
1 = moneter	Pengungkapan dalam bentuk finansial.
2 = non-moneter	Dikuantifikasi dalam bentuk numerik berat, volume, ukuran, dan lain-lain. tetapi bukan finansial.
3 = hanya kualitatif	Hanya dalam bentuk deskripsi
4 = kualitatif dan moneter	Dalam bentuk deskripsi dan finansial
5 = kualitatif dan non moneter	Dalam bentuk deskripsi dan data numerik bukan finansial
6 = moneter dan non moneter	Kombinasi dari data finansial dan numerik
7 = kualitatif, moneter, dan non moneter	Kombinasi dari bentuk deskripsi, finansial dan numerik

Sumber: Raar (2002)

Kualitas pengungkapan CSR yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kualitas dari laporan yang mengungkapkan informasi CSR perusahaan yang disajikan secara terpisah maupun bersamaan dengan laporan tahunan perusahaan. Pengukuran kualitas pengungkapan CSR dilakukan dengan menggunakan model dari Raar (2002). Kelebihan dari model pengukuran kualitas pengungkapan CSR oleh Raar lebih bisa diaplikasikan pengukurannya pada laporan keberlanjutan perusahaan yang ada di Indonesia umumnya, dan pada khususnya pada perusahaan sektor pertambangan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan akan variatifnya model pelaporan CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia. Pemberian skor diberikan atas laporan CSR perusahaan yang

disajikan dalam laporan tahunan ataupun laporan keberlanjutan yang disajikan terpisah dari laporan tahunan perusahaan. Kriteria skor pengukuran kualitas pengungkapan CSR dapat dilihat pada tabel 1.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan suatu struktur dan proses dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan dengan prinsip-prinsip *fairness, responsibility, transparency, accountability* (International Finance Corporation, 2018). Berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan, peneliti mengembangkan pengukuran yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Skala pengukuran yang digunakan Erawati *et al.*, (2021) untuk mengukur tata kelola perusahaan memberikan skor 1-3 atas mekanisme tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Skor tersebut diaplikasikan dalam penelitian ini dengan menggunakan model transparansi pengungkapan tata kelola perusahaan Cheung *et al.*, (2010) yang disesuaikan dengan indikator pengungkapan tata kelola perusahaan menurut *The Indonesian Corporate Governance Manual*. Data tata kelola perusahaan dapat diambil dari laporan tahunan perusahaan ataupun laporan *Good Corporate Governance* (GCG) yang disajikan secara terpisah dari laporan tahunan, serta ketersediaan informasi tata kelola perusahaan pada website perusahaan.

Terdapat sembilan indikator pengungkapan dalam tata kelola perusahaan menurut kriteria dari *The Indonesian Corporate Governance Manual* (IFC, 2018). Indikator-indikator tersebut terdiri dari (1) Hasil keuangan dan operasi; (2) Tujuan perusahaan; (3) Kepemilikan Saham Utama dan Hak Suara; (4) Informasi mengenai Komisaris dan Direksi; (5) Faktor risiko penting yang dapat diperkirakan; (6) Struktur dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan; (7) Karyawan dan Pemangku Kepentingan lainnya; (8) Prospektus; (9) Situs Web Perusahaan. Pengukuran skor atas sembilan indikator yang dinilai tersebut diambil dari *best practice* atas masing-masing indikator yang tertuang dalam *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dengan kriteria penilaian sebagai berikut.

Tabel 2. Pengukuran Tata Kelola Perusahaan

Skor	Pengungkapan Informasi atas Indikator Tata Kelola Perusahaan
1	Tidak memenuhi standar <i>best practice</i> pengungkapan
2	Memenuhi standar <i>best practice</i> pengungkapan
3	Melebihi standar <i>best practice</i> pengungkapan (<i>voluntary disclosure</i>)

Sumber: Cheung *et al.*, (2010)

CSR perusahaan memerlukan sumber daya keuangan, oleh karena itu peneliti menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel kontrol dan diukur dengan rasio *Return on Assets* (ROA). Selanjutnya, semakin besar perusahaan akan semakin mendapatkan tekanan dari para *stakeholder* dan mempublikasikan laporan keberlanjutan dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari para *stakeholder*. Berdasarkan pertimbangan ini maka ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari jumlah aset perusahaan. Variabel kontrol ketiga dalam penelitian ini adalah dari rasio *Leverage* yang diukur dari rasio perbandingan nilai buku total hutang terhadap total aset yang dimiliki perusahaan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi data panel. Pengujian asumsi klasik digunakan untuk mendapatkan model regresi yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Pengujian asumsi klasik yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah asumsi klasik normalitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas data. Pengujian asumsi klasik multikolinearitas tidak akan dilakukan karena pada dasarnya penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen, sehingga tidak akan terjadi korelasi antar variabel independen. Persamaan regresi linear sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$CSR D = \alpha + \beta_1 CG + \beta_2 ROA + \beta_3 LEV + \beta_4 SIZE \dots\dots\dots 1$$

Keterangan:

- CSR D = Kualitas Pengungkapan CSR
- CG = Tata Kelola Perusahaan
- ROA = Rasio keuangan perusahaan (Laba bersih/total Aset)
- LEV = Rasio hutang perusahaan (Total hutang/total Aset)
- SIZE = Ukuran perusahaan (Ln Total Aset)
- α = Konstanta
- $\beta_{1,2,3,4}$ = Koefisien regresi

Pengujian hipotesis dilakukan dengan kriteria jika koefisien $\beta > 0$ dan signifikan pada tingkat $\alpha < 0,05$.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan analisis regresi panel. Metode regresi data panel memiliki 3 metode regresi yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Penentuan metode regresi panel yang terbaik dalam mengestimasi persamaan regresi dari antara 3 model tersebut dilakukan dengan pengujian model regresi panel yang berupa uji langrange *Multiplier*, uji *Chow*, dan uji *Hausman*.

Tabel 3. Hasil Uji Pemilihan Model Regresi Panel

Pengujian	P value	Hasil	Kesimpulan
Uji Langrange <i>Multiplier</i>	0.0000	REM lebih baik dibandingkan CEM	Model terbaik yang dipilih adalah <i>Random Effect Model (REM)</i>
Uji Chow	0.0000	FEM lebih baik dibandingkan CEM	
Uji Hausman	0.1857	REM lebih baik dibandingkan FEM	

Sumber: hasil olahan data, 2023

FEM: *Fixed Effect Model*, CEM: *Common Effect Model*, REM: *Random Effect Model*.

Hasil pengujian pemilihan model regresi panel pada Tabel 3 menunjukkan bahwa model terbaik yang dapat digunakan untuk mengestimasi model regresi pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan CSR adalah *Random Effect Model (REM)*. Model *random effect* tidak memiliki unsur heteroskedastisitas dan autokorelasi karena pada dasarnya model ini menggunakan pendekatan *General Least Square (GLS)*, selain itu model GLS merupakan metode mengubah model *Ordinary Least Square (OLS)* untuk memenuhi syarat BLUE (Gujarati, 2009). Berdasarkan pada asumsi tersebut maka peneliti mengambil keputusan untuk mengabaikan pengujian asumsi klasik atas model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini. Ringkasan hasil pengolahan data panel dengan menggunakan *Random Effect Model* adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji regress pengaruh CG pada pengungkapan kualitas CSR

Variabel	Nilai Koefisien	Nilai Probabilitas
CG	3.536349	0.000
ROA	0.283336	0.702
LEV	-0.365542	0.415
SIZE	0.168740	0.245
Konstanta	-7.297435	0.004
<i>R-squared</i>	0.4753	
<i>Prob. F</i>		0.000

Sumber: hasil olahan data, 2023

CG: Tata kelola perusahaan.

Berdasarkan pada hasil pengolahan data, nilai *Probability F* adalah sebesar 0.000. Hal ini berarti model persamaan ini layak digunakan untuk mengestimasi pengaruh dari tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan CSR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata kelola perusahaan memiliki pengaruh terhadap kualitas pengungkapan CSR dengan nilai probabilitas 0.000 ($\alpha < 0,05$). Sedangkan untuk variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Besarnya pengaruh dari tata kelola perusahaan adalah sebesar 3.5363. Nilai *R-squared* sebesar 0.4753 berarti 47.53% kualitas pengungkapan CSR dari perusahaan yang menjadi sampel dipengaruhi oleh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dengan asumsi *ceteris paribus*. Persamaan regresi untuk menjelaskan pengaruh dari tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan csr dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$CSR D = -7.2974 + 3.5363 CG + 0.2833 ROA - 0.3655 LEV + 0.1687 SIZE \dots\dots\dots 2$$

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti, umumnya transparansi informasi tata kelola perusahaan maupun nilai kualitas pengungkapan CSR setiap tahunnya cenderung meningkat atau berbanding lurus. Hal ini mengindikasikan akan adanya kesadaran dari pihak perusahaan untuk terus memperbaiki mekanisme tata kelola perusahaan dan memberikan fokus pada pertumbuhan perusahaan yang lebih berkelanjutan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transparansi mekanisme tata kelola berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa secara empiris pengawasan dalam bentuk tata kelola yang baik dapat meningkatkan tanggung jawab perusahaan atas sosial lingkungan yang tercermin dalam pengungkapan kegiatan CSR perusahaan.

Transparansi atas mekanisme tata kelola perusahaan memberikan kesempatan para *stakeholder* perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi di antara *stakeholder* perusahaan. Pengungkapan informasi baik ke *internal stakeholder* maupun *external stakeholder* memegang peran penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan (Fernando & Lawrence, 2014). Pengungkapan mekanisme tata kelola perusahaan yang transparan akan mengurangi asimetri informasi di antara para pemangku kepentingan. Hal ini dikarenakan adanya transparansi mekanisme tata kelola yang memberikan pengungkapan lebih dari pengungkapan *mandatory (voluntary disclosure)* akan mengurangi kesenjangan informasi antara *internal stakeholder* dan *external stakeholder* (Cheung et al., 2010). Kesenjangan informasi antara pihak *stakeholder* internal dan eksternal yang rendah akan semakin mempermudah proses pengambilan kebijakan dalam perusahaan sebagai praktik dari teori *stakeholder* yang berfokus pada tanggung jawab pihak manajemen dalam tata kelola perusahaan (Gray et al., 1995).

Pertanggungjawaban manajerial yang dilaksanakan secara optimal akan tercermin dalam informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa demi memenuhi kepentingan para *stakeholders*, akuntabilitas yang dihasilkan dari praktik *good corporate governance mechanism* dapat meningkatkan kualitas pengungkapan CSR. Tata kelola perusahaan yang transparan dapat mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dan jujur dalam pengungkapan CSR mereka. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pengungkapan CSR dan memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan bagi para pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi yang akurat dan relevan akan mempermudah pihak manajemen perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari para pemangku kepentingannya. Hal ini sejalan dengan sudut pandang teori legitimasi atas pengungkapan CSR, yang mana pengungkapan CSR merupakan langkah

strategis pihak manajemen perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari para pemangku kepentingan (Fernando dan Lawrence, 2014).

Hasil penelitian memberikan tambahan bukti empiris atas pandangan teori *stakeholder* dan teori *legitimacy* pada praktik mekanisme tata kelola perusahaan yang transparan turut meningkatkan kualitas pengungkapan CSR. Ketika perusahaan mengejar akuntabilitas yang optimal kepada para pemangku kepentingan dengan manajemen tata kelola yang terbuka pada para pemangku kepentingan, hal ini akan memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk memonitor kegiatan perusahaan. Manajemen akan dituntut untuk melaporkan kegiatan baik kegiatan operasional maupun kegiatan CSR yang merupakan tanggung jawab perusahaan atas sosial dan lingkungan. Terpenuhinya kualitas pengungkapan CSR sebagai akibat dari kegiatan monitoring dari para pemangku kepentingan, dengan sendirinya akan memberikan legitimasi atas keberadaan perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya pengaruh dari tata kelola perusahaan yang dapat meningkatkan pengungkapan CSR. Pada penelitian sebelumnya, kerangka teori legitimasi digunakan untuk memahami sejauh mana karakteristik dari tata kelola perusahaan yang dilihat dari kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, kepemilikan asing, dewan independen, dualitas CEO, dan keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan (Khan *et al.*, 2013; Suyono & Farooque, 2018). Temuan pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang melibatkan pihak luar yang independen (kepemilikan publik, kepemilikan asing, dewan independen, dan kehadiran komite audit) berpengaruh positif terhadap praktik pengungkapan CSR perusahaan pada negara berkembang (Khan *et al.*, 2013). Selain itu, kepemilikan institusi dan besarnya dewan direksi yang dimiliki perusahaan juga terbukti mempengaruhi pengungkapan CSR (Suyono & Farooque, 2018). Secara keseluruhan, penelitian sebelumnya menyiratkan bahwa tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam memastikan legitimasi organisasi melalui pengungkapan CSR. Meskipun penelitian ini menggunakan pengukuran tata kelola perusahaan yang berbeda dari penelitian sebelumnya, tetapi hasil yang diperoleh tetap menunjukkan adanya pengaruh positif dari tata kelola perusahaan dalam mempengaruhi pengungkapan CSR.

Agar tercapainya pengungkapan CSR yang berkualitas, dalam artian bisa mengakomodir kepentingan dari para stakeholder, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki peran penting dalam memperhatikan praktik bisnis dan kegiatan sosial dari perusahaan pertambangan. Peran kementerian sangat penting dalam menjaga perusahaan pada sektor pertambangan domestik untuk mendukung keberlanjutan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pentingnya ada dorongan dari kementerian atas perusahaan untuk berusaha secara transparan dalam mengidentifikasi resiko kerusakan alam sebagai aktivitas pengambilan kekayaan alam, serta upaya menanggulangnya dengan restorasi ekosistem yang dilaksanakan dengan langkah-langkah revitalisasi. Langkah-langkah untuk menanggulangi resiko atas adanya kegiatan perusahaan harus dilakukan sejak masa pra-pertambangan sampai pascatambang oleh perusahaan pertambangan untuk melindungi keanekaragaman hayati, mengelola dampak lingkungan dan memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini akan menunjang pelaksanaan CSR yang lebih baik serta sejalan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Regulasi yang jelas dan tegas diharapkan dapat menuntut perbaikan dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam memberikan fokus untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan yang lebih berkualitas.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pada pengujian hipotesis dan pembahasan, maka peneliti menyimpulkan bahwa peningkatan ataupun penurunan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan dapat didukung dengan transparansi manajemen tata kelola

perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang diperlukan untuk pengungkapan CSR yang baik.

Perusahaan harus terus mempertahankan dan mengembangkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan pengungkapan CSR mereka. Platform online yang sudah ada untuk mempublikasikan informasi tentang pengelolaan perusahaan dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pertemuan, meminta masukan, umpan balik, dan memastikan bahwa kepentingan mereka diakomodasi dalam keputusan CSR. Dengan demikian perusahaan akan semakin mudah dalam mengidentifikasi resiko dan merumuskan langkah strategis dalam menghadapi resiko masalah sosial dan lingkungan perusahaan, yang pada akhirnya akan menghasilkan CSR yang tepat sasaran. Semakin baiknya transparansi tata kelola perusahaan akan mendorong kualitas CSR suatu perusahaan.

Bagi pemerintah, khususnya pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah dapat membuat regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas mengenai pertanggungjawaban sosial dan lingkungan atas perusahaan pertambangan. Pertanggungjawaban sosial dan lingkungan yang terlaksana dalam kegiatan CSR haruslah dapat mengidentifikasi dan menanggulangi resiko dari masa pra-tambang, sampai pada masa pasca tambang, mengingat kualitas CSR dari perusahaan pertambangan masih dinilai rendah dalam hal tersebut.

Pengukuran transparansi tata kelola dan kualitas pengungkapan CSR dalam penelitian ini menggunakan analisis konten yang mengandung subjektivitas yang tinggi. Sehingga sangat disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk bisa meningkatkan objektivitas pengukuran konten dengan menggunakan metode *inter-rater reliability* yang dilakukan dengan membandingkan persentase kesepakatan skor antar penilai dalam proses penilaian konten pengukuran kedua variabel tersebut. Selain itu, objektivitas pengukuran dari variabel dalam penelitian ini bisa juga ditingkatkan dengan menggunakan pengukuran lain yang bersifat lebih objektif seperti pada penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dalam metode pemilihan sampel, karena sifat dari metode ini yang memilih sampel dengan kriteria tertentu, membuat hasil penelitian ini tidak dapat digunakan untuk generalisasi hasil. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah dengan menggunakan *probability sampling* dan memperluas sampel penelitian dengan ikut melibatkan sektor lain yang belum dimasukkan dalam penelitian ini agar bisa mendapatkan sampel penelitian dan jumlah observasi yang lebih banyak sehingga hasil yang diperoleh bisa untuk mengeneralisasikan hubungan antara tata kelola perusahaan dan CSR.

Daftar Pustaka

- Anugerah, E. G., Saraswati, E., & Andayani, W. (2018). Quality Of Disclosure And Corporate Social Responsibility Reporting Practices In Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 22(3), 337. <https://doi.org/10.24912/ja.v22i3.392>
- Arlı, D., & Tjiptono, F. (2014). Does corporate social responsibility matter to consumers in Indonesia? *Social Responsibility Journal*, 10(3), 537–549. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2013-0007>
- Cabeza, L., Sacristán, M., & Gómez, S. (2017). Family involvement and corporate social responsibility disclosure. *Journal of family business strategy*, 8(2), 109–122. <https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2017.04.002>
- Cheung, Y.-L., Jiang, P., & Tan, W. (2010). A transparency disclosure index measuring disclosures: Chinese listed companies. *Journal of Accounting and Public Policy*, 29(3), 259–280. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.02.001>
- Corry. (2022). *Inilah 17 Perusahaan Ber-CSR Terbaik ICSRA V 2022*. Economic Review. <https://economicreview.id/inilah-17-perusahaan-ber-csr-terbaik-2022/>. Diakses pada tanggal 08 Maret 2023.

- Erawati, N. M. A., Sutrisno, T., Hariadi, B., & Saraswati, E. (2021). The Role of Corporate Social Responsibility in the Investment Efficiency: Is It Important? *The Journal of Asian Finance, Economics, and Business*, 8(1), 169–178. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.169>
- Fernando, S., & Lawrence, S. (2014). A theoretical framework for CSR practices: integrating legitimacy theory, stakeholder theory and institutional theory. *Journal of Theoretical Accounting Research*, 10(1), 149–178. https://www.researchgate.net/publication/290485216_A_theoretical_framework_for_CSR_practices_Integrating_legitimacy_theory_stakeholder_theory_and_institutional_theory
- Giannarakis, G., Konteos, G., & Sariannidis, N. (2014). Financial, governance and environmental determinants of corporate social responsible disclosure. *Management Decision*, 52(10), 1928–1951. <https://doi.org/10.1108/MD-05-2014-0296>
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2), 47–77. <https://doi.org/10.1108/09513579510146996>
- Gujarati, D. N. (2009). *Basic econometrics* (fifth Edit). McGraw-Hill.
- Gunawan, J. (2015). Corporate social disclosures in Indonesia: stakeholders' influence and motivation. *Social Responsibility Journal*, 11(3), 535–552. <https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2014-0048>
- International Finance Corporation. (2018). *The Indonesia corporate governance manual* (2nd ed.). World Bank Group.
- Kamodi, J. G. B., Sumampouw, O., & Karundeng, F. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Laba Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(3), 496–505. <https://doi.org/https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3468>
- Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2013). Corporate governance and corporate social responsibility disclosures: Evidence from an emerging economy. *Journal of business ethics*, 114(2), 207–223. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1336-0>
- Michelon, G., Boesso, G., & Kumar, K. (2013). Examining the link between strategic corporate social responsibility and company performance: an analysis of the best corporate citizens. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 20(2), 81–94. <https://doi.org/10.1002/csr.1278>
- PGR. (2023). *Mining Sector in Indonesia*. Patra Government Relationship. <https://www.patragr.com/publication/2023/3/17/mining-sector-in-indonesia>. Diakses pada tanggal 01 Agustus 2023.
- Prior, D., Surroca, J., & Tribó, J. A. (2008). Are socially responsible managers really ethical? Exploring the relationship between earnings management and corporate social responsibility. *Corporate Governance: An International Review*, 16(3), 160–177. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2008.00678.x>
- Raar, J. (2002). Environmental initiatives: towards triple-bottom line reporting. *Corporate communications: An international journal*, 7(3), 169–183. <https://doi.org/10.1108/13563280210436781>
- Runtu, T., & Naukoko, P. A. (2014). Hubungan antara Environmental Performance Tahun Sebelumnya dengan Economic Performance Tahun Berjalan (Studi pada perusahaan tambang yang mengikuti program PROPER dan terdaftar di IDX). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill,"* 5(1), 60–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v5i1.4931>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (6 ed.). Salemba Empat.
- Suyono, E., & Farooque, O. Al. (2018). Do governance mechanisms deter earnings management and promote corporate social responsibility? *Accounting Research Journal*, 31(3), 479–495. <https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2015-0117>

- Syed, M. A., & Butt, S. A. (2017). Financial and non-financial determinants of corporate social responsibility: empirical evidence from Pakistan. *Social Responsibility Journal*, 13(4), 780–797. <https://doi.org/10.1108/SRJ-08-2016-0146>
- Tinker, A. (1984). Theories of the state and the state of accounting: economic reductionism and political voluntarism in accounting regulation theory. *Journal of Accounting and Public Policy*, 3(1), 55–74. [https://doi.org/10.1016/0278-4254\(84\)90012-7](https://doi.org/10.1016/0278-4254(84)90012-7)